

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya serta dukungan dari berbagai pihak, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 bisa diselesaikan.

Rencana Strategis ini disusun setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 ditetapkan, serta asumsi-asumsi dasar yang menggambarkan peran serta potensi sub sektor perkebunan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, melalui program-program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang jelas, terukur dan berlanjut serta dapat dipertanggung jawabkan.

Demikianlah, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2029. Semua saran dan kritik masih kami harapkan guna penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan kedepan.

Palembang, 8 September 2025

**Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19760425 199412 1 001**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
BAB I PENDAHULUAN	Page 1
1.1. Latar Belakang	Page 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Page 1
1.3. Maksud dan Tujuan	Page 4
1.4. Sistematika Penulisan	Page 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Page 7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	Page 7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	Page 7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	Page 12
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	Page 14
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	Page 21
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	Page 22
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	Page 22
2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	Page 22
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Page 22
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..	Page 22
2.2.2. Isu Strategis	Page 25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Page 28
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029.....	Page 28

3.2. Sasaran Rentra Perangkat Daerah Provinsi	
Tahun 2025 - 2029.....	Page 28
3.3. Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun	
2025 - 2029.....	Page 30
3.4. Penahapan Pembangunan	Page 30
3.5. Penyajian Lokus	Page 31
3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi	
Tahun 2025 - 2029.....	Page 31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. .	Page 34
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Page 34
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan	
Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui	
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat	
Daerah.....	Page 53
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029	
melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Page 56
BAB V Penutup.....	Page 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Unit Pengolahan Pemasaran Bokar (UPPB) di Provinsi Sumatera Selatan	Halaman Page 10
Tabel 2.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	Page 13
Tabel 2.3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai.....	Page 13
Tabel 2.4.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	Page 13
Tabel 2.5.	Sarana dan Prasarana yang Dimiliki.....	Page 14
Tabel 2.6.	Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024.....	Page 14
Tabel 2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	Page 19
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	Page 20
Tabel 2.9.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	Page 27
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra PD	Page 29
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	Page 30
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	Page 33
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	Page 35
Tabel 4.2.	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	Page 42
Tabel 4.3.	Rincian Komponen Belanja	Page 51
Tabel 4.4.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Page 52
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025- 2030.....	Page 53
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030	Page 56

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Page 12

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Target dan Realisasi Produktivitas Karet Tahun 2020 - 2024	Page 15
Grafik 2.2. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2020 - 2024	Page 16
Grafik 2.3. Target dan Realisasi Produktivitas Kopi Tahun 2020 - 2024	Page 16
Grafik 2.4. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Tahun 2020 - 2024	Page 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan perencanaan daerah dengan visi dan misi Kepala Daerah dan kebijakan daerah.

Renstra merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintah daerah yang profesional, efektif dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Adapun peran penting dari dokumen Renstra sebagai berikut:

1. Sebagai alat perencanaan strategis yang menjembatani antara kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan operasional perangkat daerah dalam jangka menengah, memastikan pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan,
2. Membantu perangkat daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
3. Sebagai dokumen acuan dalam mengambil keputusan sehingga program pembangunan berjalan dengan efektif.
4. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dan lembaga terkait bersinergi dalam pembangunan daerah.
5. Menjadi dasar dalam pelaporan kinerja dan akuntabilitas kepada publik sehingga pembangunan dan penggunaan sumber daya dapat lebih transparan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, disusun dengan memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029;
16. Instruksi Presiden Noor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2045;
29. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
32. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan selama lima tahun kedepan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan perkebunan di Sumatera Selatan.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk menjadikannya sebagai instrumen dalam menyatukan gerak langkah seluruh jajaran perkebunan, tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang terintegrasi dengan sub sektor atau sektor terkait dengan prinsip kesetaraan, keadilan dan 'no one left behind' (tidak ada seorangpun yang tertinggal) dalam mencapai tujuan pembangunan perkebunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani pekebun dan memasukkan

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja
 - 2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029
- 3.4. Penahapan Pembangunan
- 3.5. Penyajian Lokus
- 3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP), dan
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dinas adalah memberikan pelayanan antara lain:

Pelayanan di Bidang Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perkebunan dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perkebunan ;

2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tatalaksana;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan di Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang prasarana dan sarana meliputi sarana produksi, pembiayaan dan lahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
2. Perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
3. Perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
4. Perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
5. Perencanaan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang perkebunan;
6. Perencanaan pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;
7. Perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
8. Pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
9. Pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
10. Perencanaan dan inventarisasi dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
11. Pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengolahan

dan pemasaran hasil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas :

- a) Perencanaan kebijakan dan program pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;
- b) Perencanaan pengembangan kerjasama pemasaran hasil perkebunan;
- c) Perencanaan pengembangan alat/mesin pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- d) Perencanaan kegiatan fasilitasi standarisasi alsintan dan unit pengolahan;
- e) Perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
- f) Perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
- g) Perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- h) Perencanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia pengolahan hasil perkebunan;
- i) Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pengolahan dan pemasaran hasil membangun kerjasama pemasaran hasil perkebunan dalam bentuk pengikutsertaan dalam pameran-pameran seperti pameran hari pangan sedunia, gelar agribisnis panas, Sriwijaya Internasional Expo, South Sumatera Expo, dan lain sebagainya. Melaksanakan pembinaan unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB). Sampai tahun 2024 tercatat ada 413 UPPB yang sudah terbentuk dan telah teregistrasi dan tersebar di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data UPPB secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Unit Pengolahan Pemasaran Bokar (UPPB) di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah UPPB (unit)
1.	Ogan Ilir	22
2.	Muara Enim	57
3.	Banyuasin	77
4.	Oku Timur	14
5.	Prabumulih	8
6.	OKI	20
7.	Lahat	10
8.	Musi Rawas	24
9.	Lubuk Linggau	4
10.	Musi Banyuasin	122
11.	PALI	16
12.	OKU	29
13.	Empat Lawang	7
14.	Muratara	2
15.	Palembang	1
Jumlah		413

Pelayanan di Bidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi mempunyai fungsi :

- Perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- Perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- Perencanaan program pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan;
- Perencanaan pembinaan, pengawasan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya perkebunan;
- Perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- Perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Peningkatan produktivitas perkebunan sangatlah dipengaruhi penggunaan bibit unggul serta bagaimana pelaksanaan budidaya

perkebunan yang baik. Pelayanan dalam bidang produksi memiliki peran bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan tersebut. Peningkatan produktivitas ini dilaksanakan dengan memberikan pembinaan teknis dan bantuan benih/bibit unggul yang bersertifikat, sarana produksi serta pembinaan-pembinaan pelaksanaan budidaya perkebunan yang baik kepada petani perkebun.

Pelayanan di Bidang Kelembagaan Usaha Perkebunan dan Penyuluhan

Bidang kelembagaan usaha dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang kelembagaan usaha dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pembinaan, pendampingan dan pengembangan kelembagaan dan perusahaan perkebunan;
- b. Perencanaan kebijakan dan program di bidang penyuluhan;
- c. Perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
- d. Perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
- e. Perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
- f. Pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup dan usaha perkebunan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna Usaha perkebunan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang ini melaksanakan pengawasan dan pembinaan perusahaan-perusahaan perkebunan agar melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan dan undang-undang serta melakukan penyuluhan di bidang perkebunan. Pelaksanaan rekomendasi kelayakan usaha perkebunan juga diberikan terhadap perusahaan yang akan mengajukan HGU baru atau perpanjangan. Selain itu menjaga kemitraan perkebunan agar tetap harmonis serta melaksanakan pembinaan kelembagaan petani melalui sistem kebersamaan ekonomi (SKE) dan sebagainya.

Pelayanan di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

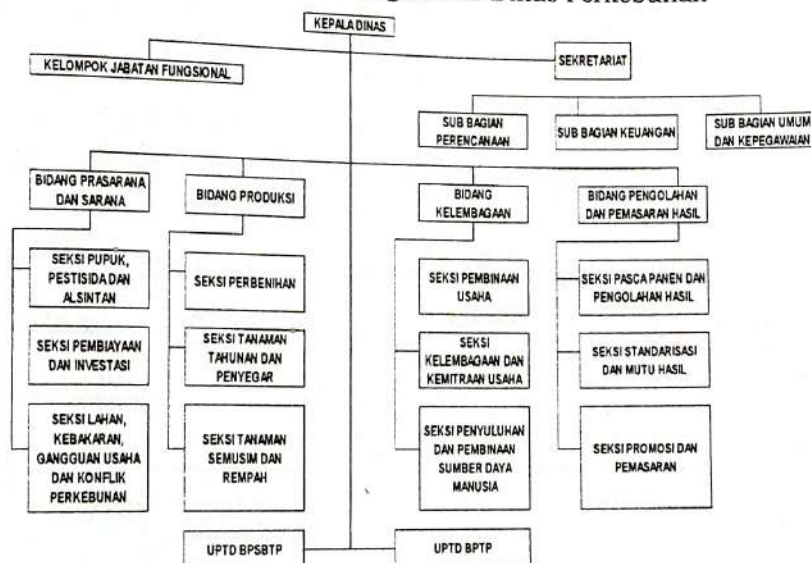
Pelayanan yang dilakukan berupa pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan sertifikasi benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih yang ada.

Proses sertifikasi ini dilaksanakan untuk menghindari beredarnya benih-benih yang tidak unggul. Dengan dilaksanakannya proses sertifikasi ini diharapkan benih/bibit yang ditanam merupakan benih/bibit unggul sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas tanaman perkebunan.

Pelayanan di Bidang Proteksi Tanaman Perkebunan

Pelayanan dalam bidang proteksi perkebunan dengan melaksanakan kegiatan proteksi perlindungan tanaman perkebunan, penyediaan sarana atau bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, pengamatan dan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan serta pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan juni 2025 berjumlah 56 orang dan 41 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang secara lengkap disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	PNS dan PPPK		
	SMA	20	20,61
	D3	3	3,10
	S1	50	51,55
	S2	24	24,74
	Total.....	97	-
2.	Non PNS		
	SD	1	2,08
	SMA	10	20,84
	D3	1	2,08
	S1	35	72,92
	S2	1	2,08
	Total.....	48	-

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	PNS dan PPPK		
	Laki-laki	53	54,63
	Perempuan	44	45,37
	Jumlah	97	
2.	Non PNS		
	Laki-laki	24	50,00
	Perempuan	24	50,00
	Jumlah	48	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadi kesenjangan komposisi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.4 . Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	ASN (PNS)		
	IV/d	1	1,79
	IV/b	6	10,71
	IV/a	12	21,42
	III/d	13	23,21
	III/c	7	12,5
	III/b	7	12,5
	III/a	2	3,58
	II/d	5	8,92
	II/c	2	3,58
	II/b	1	1,79
2.	ASN (PPPK)		
	Penata Muda (IX)	32	78,06
	(VII)	1	2,43
	(V)	8	19,51

Total pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 berjumlah 145 orang yang terdiri dari Pegawai PNS berjumlah 56 Orang, PPPK berjumlah 41 orang dan Pegawai Non PNS berjumlah 48 Orang.

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana yang dimiliki

No.	Uraian	Volume	Kondisi
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 Unit	Baik
2.	Bangunan Gedung Lainnya	10 Unit	Baik
3.	Bangunan Lainnya	4 Unit	Baik
4.	Tanah Bangunan kantor, rumah dan tempat kerja lainnya	10.158 M ²	-
5.	Tanah Perkebunan	420.000 M ²	-
6.	Kendaraan Roda 4	11 Unit	Baik
7.	Kendaraan Roda 2	49 Unit	Baik

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Selama tahun 2020 - 2024 ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan, beberapa penghargaan antara lain :

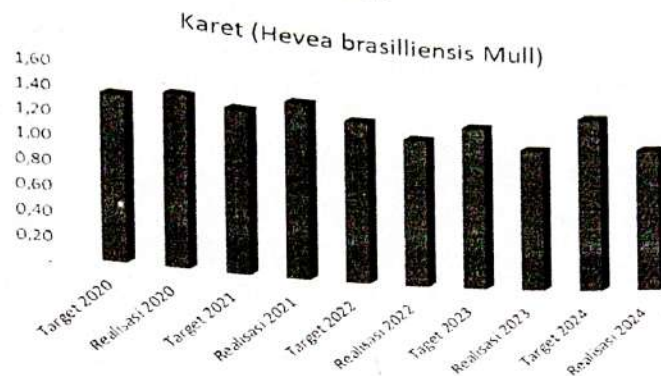
1. Penghargaan dari MURI terkait dengan Program Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kopi diberikan langsung oleh Customer Relation Manager MURI Indonesia. Kegiatan sambung pucuk ini telah dilakukan sebanyak 1 juta sambung pucuk di tahun 2021 dan 1 juta sambung pucuk di tahun 2022 melalui dana bantuan keuangan Gubernur Sumatera Selatan.
2. Penghargaan Anugrah Perkebunan Indonesia, kategori "Pengawalan dan Pendampingan Kebijakan Pembangunan Perkebunan" diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada hari Perkebunan ke 65 tahun 2022.

Tabel 2.6. Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024

Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Peningkatan Produksi (%)
Kelapa Sawit	3.323.670	3.445.027	3.354.192	3.370.527,92	3.399.995,63	0,43
Karet	1.215.233	1.246.559	1.069.561	1.003.780,13	1.008.362,07	-2,58
Kopi	163.868	211.681,48	208.043,49	206.655,70	218.667,51	3,67
Kelapa	57.732	58.121,20	61.273,50	61.563,76	61.647,20	1,40
Lainnya	93.546	210.489	322.304	178.329,19	190.152,28	25,00

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

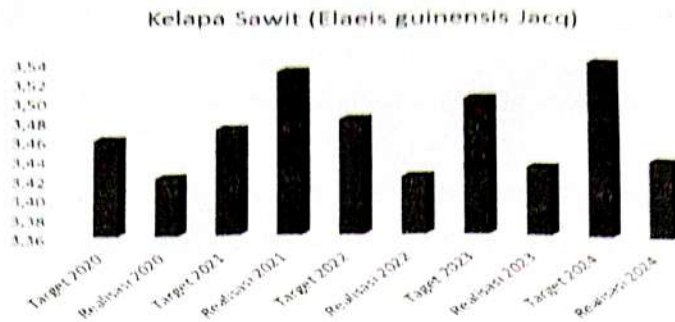
Dari tabel di atas produksi perkebunan komoditi karet mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 1.008.362,07 ton atau sebesar 0,46% dari tahun 2023 dengan produksi sebesar 1.003.780,13 ton. Tetapi secara rata-rata selama 5 tahun mengalami penurunan produksi sebesar -2,58%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan luas tanaman menghasilkan dari luasan 865,862 Ha pada tahun 2020 turun menjadi 838.711 ha pada tahun 2024.



Grafik 2.1. Target dan Realisasi Produktivitas Karet Tahun 2020 – 2024

Jika dibandingkan selama tahun 2020 – 2024 terjadi fluktuasi produktivitas Karet seiring dipengaruhi harga serta kondisi iklim. Selain dipengaruhi oleh pasar internasional, harga karet pun sangat dipengaruhi oleh kualitas karet. Petani bisa memperbaiki mutu karet sehingga harga yang didapatkan bisa lebih tinggi. Mutu karet harus di jaga begitu juga dengan kadar kering karet karena akan sangat mempengaruhi harga jualnya. Salah satu usaha untuk meningkatkan harga, dengan mendorong industri hilir dalam negeri antara lain pabrik ban, aspal karet dan sebagainya akan dapat memperbaiki harga ditingkat petani sehingga tidak tergantung pada pangsa ekspor.

Data produksi perkebunan komoditi kelapa sawit pada tahun 2023 sebesar 3.370.527 ton mengalami kenaikan produksi sebesar 29.467 Ton pada tahun 2024 menjadi sebesar 3.399.995 ton. Pada tahun 2023 luas tanaman menghasilkan 982.463 Ha dan pada tahun 2024 seluas 986.194 Ha meningkat seluas 3.731 Ha, sedangkan produktivitas pada tahun 2024 sebesar 3,44 Ton/Ha/Tahun sedangkan pada tahun 2023 sebesar 3,43 Ton/Ha/Tahun.

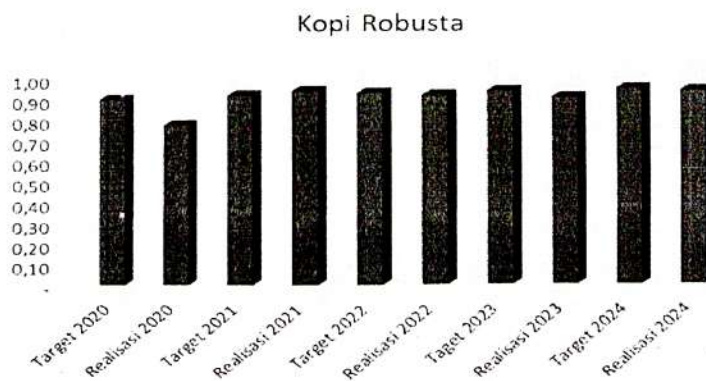


Grafik 2.2.. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2020 – 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat secara umum pencapaian terhadap target produktivitas Kelapa Sawit mengalami fluktuatif, target produktivitas dipengaruhi oleh:

- Kegiatan Peremajaan kelapa sawit;
- Harga komoditi kelapa sawit yang masih stabil walaupun mulai menurun seiring fluktuasinya harga CPO di tingkat ekspor.

Data produksi perkebunan komoditi Kopi pada tahun 2024 sebesar 218.667,51 ton dan pada tahun 2023 sebesar 206.655,7 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 12.011 Ton, pada tahun 2024 luas tanaman menghasilkan 233.565 Ha dan pada tahun 2023 seluas 230.318, sedangkan produktivitas pada tahun 2024 sebesar 0,93 Ton/ha/tahun sedangkan pada tahun 2023 sebesar 0,90 Ton/ha/tahun.



Grafik 2.3. Target dan Realisasi Produktivitas Kopi Tahun 2020 – 2024

Dari grafik di atas produktivitas tanaman kopi di Sumatera Selatan masih jauh dari standar produksi kopi sesuai anjuran. Produktivitas kopi di Sumatera Selatan menurut data statistik perkebunan hanya 0,93 ton/Ha/Tahun sedangkan standar

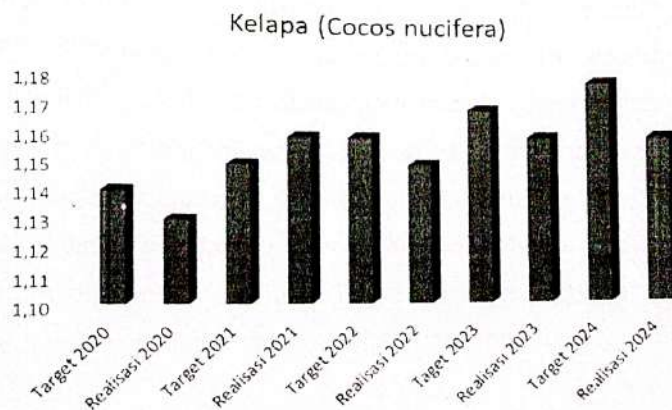
produktivitas adalah 1,3 ton/Ha/Tahun dan bahkan bisa mencapai 2 ton/Ha/Tahun.

Upaya peningkatan produksi perkebunan kopi, maka akan dilakukan :

- Peremajaan tanaman kopi dengan cara rejuvinasi (sambung pucuk) dengan entres yang merupakan klon unggul dengan membangun kebun sumber benih;
- Penggunaan bibit kopi SE (Somatik Embriogenesis) pada penanaman baru;
- Melakukan intensifikasi tanaman kopi.

Untuk meningkatkan produksi kopi, dapat dilaksanakan peremajaan kopi rakyat dengan cara sambung pucuk (rejuvinasi). Selain cepat menghasilkan, peremajaan sambung pucuk juga dapat meningkatkan produksi kopi hampir 2 (dua) kali lipat dari tanaman kopi biasa.

Data produksi komoditi Kelapa pada tahun 2024 sebesar 61.647 ton dan pada tahun 2023 sebesar 61.563 ton, peningkatan produksi rata-rata sebesar 1,4 %, pada tahun 2023 luas tanaman menghasilkan 53.109 Ha dan pada tahun 2024 seluas 53.048, sedangkan produktivitas pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 1,16 Ton/ha/tahun.



Grafik 2.4. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Tahun 2020 - 2024

Dari data grafik di atas, dapat dilihat terjadi fluktuasi produktivitas tanaman Kelapa. Komoditas kelapa tidak seperti komoditas karet dan kelapa sawit yang diusahakan dalam skala perkebunan besar. Banyak tanaman kelapa yang hanya merupakan tanaman perkarangan

sehingga produksinya tidak terdata dengan baik dan tidak begitu optimal sedangkan luas areal kelapa terbesar ada di Kabupaten Banyuasin seluas 7.494 Ha. Untuk meningkatkan produksi kelapa perlu terus dilakukan dengan memberikan bantuan bibit kelapa yang unggul serta pengalokasian pupuk bersubsidi yang lebih besar untuk perawatan/pemeliharaan pada komoditi kelapa tersebut.

Selain luas areal dan produksi komoditi perkebunan, kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari data jumlah usaha perkebunan. Pada tahun 2025 data jumlah usaha pekebunan yang di himpun melalui aplikasi SIPARIBUN berjumlah 203 usaha Perkebunan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan secara rutin setiap tahunnya terus dilaksanakan seperti Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar, melakukan Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan, Monitoring dan evaluasi Perusahaan Besar, Pendataan perkebunan, Pembinaan Amdal Perkebunan dan Pembinaan dan Pengawasan Revitalisasi Perkebunan. Kegiatan pengawasan unit usaha perkebunan juga dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kunjungan langsung ke pabrik dan perusahaan perkebunan.

Pendidikan dan pelatihan terhadap SDM perkebunan perlu menjadi perhatian, karena pelatihan ini bertujuan agar SDM perkebunan memiliki keahlian dan keterampilan baik dalam teknik budidaya maupun kelembagaan usaha perkebunan. Dengan semakin baiknya kualitas SDM perkebunan diharapkan memiliki nilai tawar yang baik sehingga harga ditingkat petani menjadi lebih tinggi dan kesejahteraan petani menjadi meningkat. Disamping itu, meningkatnya kemampuan petani dalam melakukan budidaya perkebunan sesuai anjuran sangatlah diperlukan terutama bagaimana menanggulangi hama dan penyakit sehingga dapat meningkatkan umur produktif tanaman.

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke -					Pencapaian Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan (%)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan (%)	-	-	-	-	0.17	0.18	0.20	0.39	-	0.38	0.22	0.66	0.16	-	223.5	122.2	303	41.00
2	Jumlah luas areal perkebunan (Ha)	-	-	-	2.840.000	2.845.000	2.850.000	2.855.000	2.960.000	2.927.809	2.950.636	2.953.493	2.859.486.07	2.861.226	103.1	101.7	101.6	104.18	97.00
3	Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn)	-	-	-	1.34	1.35	1.35	1.36	1.47	1.40	1.46	1.47	1.19	1.17	104.5	106.1	106.9	57.50	79.59
4	Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn)	-	-	-	3.46	3.47	3.48	3.50	3.54	3.42	3.53	3.84	3.43	3.43	96.8	101.7	110.3	98.00	94.89
5	Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn)	-	-	-	0.90	0.78	0.79	0.80	0.94	0.77	0.93	0.91	0.89	0.89	85.6	119.2	113.2	111.25	94.58
6	Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn)	-	-	-	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.13	1.17	1.16	1.16	1.15	99.1	101.7	100.0	99.15	97.46
7	Jumlah Produksi Perahun (Ton)	-	-	-	-	-	4.590.000	4.600.000	-	-	-	5.015.373	4.820.856.70	-	-	-	109.27	106.87	-
8	Jumlah Benih Unggul yg beredar (Benih)	-	-	-	34.000.000	34.500.000	34.600.000	35.000.000	17.000.000	21.265.758	14.589.520	16.654.222	18.420.044	19.076.378	62.5	42.3	48.1	52.63	113.2
9	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan (%)	-	-	-	5	5	-	-	-	6.74	6.74	-	-	-	134.8	134.8	-	-	-
10	Persentase prasarana perkebunan yang dimanfaatkan (%)	-	-	-	-	66	66	83	13.70	-	66	66	100	20	-	100.0	100.0	120	146
11	Meningkatnya penguasaan perusahaan perkebunan (unit)	-	-	-	-	230	230	240	316	-	316	316	316	316	-	137.4	137.4	131.70	100
12	Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama (%)	-	-	-	6.30	6.50	6.70	7.00	24.10	17.72	18.63	24.02	10.50	26.6	281.3	286.6	354.5	150	110.4
13	Jumlah Usaha Perkebunan yang terawasi (unit)	-	-	-	230	230	-	-	-	312	276	-	-	-	135.7	120.0	-	-	-
14	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan (kelompok)	-	-	-	-	-	40	40	92	-	-	91	71	122	-	-	227.5	177.50	122.6
15	Nilai Tukar Petani Perkebunan	-	-	-	-	-	96	98	115.1	-	-	115.07	103.06	130.35	-	-	119.86	107.21	113.3
16	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha (Ha)	-	-	-	-	-	2.950	3.000	650	-	-	550	500	32.767	-	-	18.6	18.700	100
17	Jumlah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang terkendali (Ha)	-	-	-	1.500	1.750	-	-	-	350	300	-	-	-	23.3	17.1	-	-	-
18	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	-	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	111.1	111.1	111.1	111.1	100

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Pelaksanaan dan Anggaran Pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	12.683.358.000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)	2.453.887.900	-	-	-	-	12.682.328.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	140.000.000	-	-	-	-	1.953.807.736	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000	-	-	-	-	34.615.770	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000	-	-	-	-	87.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000	-	-	-	-	61.743.713	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	289.000.000	-	-	-	-	53.961.381	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Program Peningkatan Produk dan Produktivitas Perkebunan	85.000.000	-	-	-	-	131.489.864	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	100.000.000	-	-	-	-	40.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan	1.645.022.702	-	-	-	-	65.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Program Persekolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1.953.323.700	-	-	-	-	115.519.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	41.912.100	-	-	-	-	1.333.392.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	-	-	-	-	-	23.381.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	12.984.377.000	14.587.236.580	14.142.641.200	13.116.925.563	-	12.772.531.707	12.357.519.753	12.772.531.707	13.109.263.475	12.160.556.072	93,17	87,56	92,99	92,71	93,58
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	1.698.186.200	1.694.800.000	3.081.250.000	59.325.355	-	1.620.679.608	1.335.266.507	1.620.679.608	2.996.629.653	58.825.355	90,41	95,63	97,25	98,16	98,49
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	897.240.000	85.000.000	3.379.420.000	-	-	84.915.000	888.369.677	84.915.000	3.312.674.700	-	94,01	99,90	98,02	-	99,90
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	170.000.000	290.000.000	315.000.000	-	-	252.417.899	164.695.600	252.417.899	303.703.845	-	96,88	87,04	96,41	-	96,88
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	70.000.000	75.000.000	100.000.000	-	-	70.742.649	61.835.000	70.742.649	50.149.000	-	88,34	94,32	90,48	-	88,34
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	930.000.000	5.484.641.981	3.980.501.682	20.674.065.000	-	5.571.000	3.263.561.030	5.571.000	3.957.094.930	7.194.082.350	0,60	45,97	94,81	96,25	96,25
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	16.749.803.200	22.216.678.561	26.998.812.882	33.850.315.918	-	15.013.251.537	20.064.847.883	25.729.846.603	19.713.460.777	76,51	99,63	90,31	85,30	88,24	88,24
21	Total Anggaran	21.676.504.402	21.676.504.402	21.676.504.402	21.676.504.402	-	21.676.504.402	21.676.504.402	21.676.504.402	21.676.504.402	21.676.504.402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Jika dilihat dari tabel di atas, rata-rata pertumbuhan anggaran cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2024, di tahun 2020 alokasi anggaran sebesar Rp. 21.676.504.402,- dan di tahun 2024, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp. 33.850.315.918,- namun jika dilihat dari rasio penyerapan anggaran rata-rata mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi karena pada beberapa program kegiatan, tingkat serapannya rendah sehingga ikut mempengaruhi pelaksanaan dalam pencapaian target kinerja tahunan. Seperti di tahun 2024, terdapat kegiatan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang sebagian besar kegiatannya belum terlaksana karena ruang lingkup kegiatan yang sama dengan Kab/ Kota.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Data statistik perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah petani yang berusaha di sektor perkebunan terdapat sebanyak 1.217.712 kepala keluarga, baik itu yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan). maupun perorangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan terus berupaya untuk memberikan perhatian kepada petani pekebun terutama yang tergabung dalam kelompok tani/kelompok wanita tani dan gabungan kelompok tani, dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan anggota kelompok tani.

Unit usaha perkebunan juga tidak lepas dari perhatian Dinas perkebunan. Pengawasan rutin terus dilakukan seperti pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 313 unit usaha perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu juga pengawasan dan pembinaan secara rutin juga dilakukan kepada para produsen benih/bibit tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Pengawasan ini meliputi pengawasan peredaran benih/bibit, pengawasan mutu benih/bibit yang ditandai dengan sertifikat pada benih/bibit tersebut.

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Perkebunan bekerja sama dengan mitra yang berada di kecamatan dalam hal perlindungan kepada masyarakat pekebun, deteksi dan pencegahan dini timbulnya konflik di lahan perkebunan, sosialisasi dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan layanan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, bermitra dengan:

1. Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Perkebunan)
2. Dinas yang membidangi sub sektor perkebunan kabupaten/kota
3. Perangkat Daerah terkait
4. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
5. Lembaga Swadaya Masyarakat

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Belum ada peran dan kontribusi BUMD dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antar wilayah untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Melalui kerjasama, sumber daya dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi serta stabilitas sosial dan lingkungan. Kerjasama daerah juga akan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama yang terjalin adalah:

- a) Kerjasama dengan lembaga non pemerintah, yaitu kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan *The International Center for Research In Agroforestry* (ICRAF).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada dasarnya pelaksanaan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan serta mendukung visi dan misi RPJMD.

Namun demikian masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan bidang perkebunan. Adapun permasalahan yang masih terus dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pelayanan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, SDM yang dimiliki masih terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu penambahan pegawai dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk seluruh pegawai dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

2. Mutu produk yang dihasilkan pada perkebunan (rakyat) pada umumnya masih rendah (asalan), sehingga menyebabkan harga jual produk yang diterima petani juga rendah.

Untuk mendapatkan mutu produk yang baik, produsen harus menguasai cara pengolahan sesuai SNI dan standarisasi ekspor. Untuk semua hasil produk perkebunan yang akan di ekspor diberlakukan standar ISO 9000, ISO 14.000. termasuk kadar residu terhadap produk-produk perkebunan akibat pengelolaan pasca panen yang belum memenuhi standar serta penggunaan bahan-bahan kimia yang tinggi.

3. Iklim berusaha kurang kondusif

Iklim usaha yang kurang kondusif ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang tidak populer, misalnya pemberlakuan pajak ekspor CPO, selain itu faktor keamanan yang kurang mendukung, baik gejala ekonomi (penjarahan kebun) maupun gejala politik.

Iklim usaha yang kurang kondusif ini juga termasuk system perpajakan, kepastian hukum terhadap sengketa lahan dan Peraturan Daerah yang belum optimal mendukung iklim investasi yang mengakibatkan tingginya resiko investasi.

4. Rendahnya produktivitas dan mutu hasil

Kondisi produktivitas hasil perkebunan pada umumnya masih rendah terutama perkebunan rakyat. Rendahnya produktivitas hasil karena penerapan teknologi maju di petani yang belum optimal. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan modal dan pengetahuan, sebagian besar petani belum menggunakan benih/bibit unggul, serta rendahnya penggunaan pupuk dan obat-obatan bahkan kadang-kadang sarana produksi ini langka dipasaran, serta makin banyaknya tanaman yang sudah masuk ketegari tanaman tua/rusak sehingga mengakibatkan produksi menurun. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.

Akselerasi produktivitas komoditas perkebunan sangat terkait kepada pola pengelolaan teknis budidaya, mulai dari penyiapan lahan, penggunaan bibit/benih unggul, pemeliharaan, pengendalian hama penyakit, panen dan penanganan pasca panen.

Dari produktivitas komoditi perkebunan pun masih banyak yang bisa ditingkatkan terutama untuk komoditas karet dan kopi. Peningkatan produktivitas ini dapat dilaksanakan dengan melakukan peremajaan tanaman yang sudah tua baik itu melalui pergantian tanaman yang tua dengan benih baru yang bersertifikat maupun dengan melaksanakan rejuvinasi (sambung pucuk) untuk tanaman kopi. Dengan menerapkan teknis penyadapan yang baik dapat memperpanjang usia produktif sehingga produktivitas per siklus hidup karet meningkat.

Mutu hasil perkebunan sebagaimana produktivitas juga rendah terutama hasil perkebunan rakyat, karena produksinya masih produk asalan, sebagai contoh petani belum mengolah bahan olah karet (bokar) sesuai teknologi yang dianjurkan, buah kopi dipanen masih bercampur buah hijau atau melaksanakan penjemuran di atas tempat yang tidak layak.

5. Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan petani

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan selama ini adalah masih rendahnya tingkat produktivitas dan mutu hasil, hal ini disebabkan belum maksimalnya pengelolaan usaha dalam penerapan teknologi, penanganan panen dan pasca panen ini akibat rendahnya kualitas SDM petani pekebun. Di samping itu belum berperan dan berkembangnya kelembagaan di tingkat petani, mulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun koperasi primer di tingkat petani sehingga posisi rebut tawar (*bargaining position*) petani hanya sebagai "Price taker" bukan sebagai "Price Decider" dan bergerak hanya pada on farm dan margin hanya diperoleh dari penjualan produk primer.

Di samping masalah rendahnya kualitas SDM petani, kemampuan petugas lapangan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada petani masih terbatas, sehingga masih memerlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan serta menambah wawasan berpikir bagi para petugas penyuluh.

6. Kurang tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana perkebunan

Aktivitas perkebunan pada umumnya terdapat pada wilayah – wilayah terpencil, dengan kondisi prasarana perhubungan darat seperti jalan dan jembatan yang belum memadai, yang diperlukan untuk kelancaran sarana transportasi baik untuk angkutan saprodi maupun pengangkutan hasil

produksi perkebunan dari dan ke sentra produksi perkebunan. Disamping itu perlu adanya dukungan prasarana perhubungan laut seperti pelabuhan ekspor yang memadai untuk penambahan kapasitas bongkar muat dan angkutan.

Keadaan perekonomian yang belum kondusif dengan harga sarana produksi baik pupuk, obat – obatan maupun bibit unggul semakin meningkat sehingga tidak terjangkau oleh daya beli petani. Di samping harga saprodi yang tinggi, pada tempat-tempat tertentu saprodi tidak tersedia atau langka, kondisi ini merupakan kendala bagi petani untuk petani meningkatkan produktivitasnya.

7. Kebakaran Lahan Perkebunan

Kebakaran lahan perkebunan merupakan salah satu permasalahan krusial yang sering dihadapi. Kebakaran lahan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, sehingga mengancam keberlanjutan produksi, merusak ekosistem dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Kebakaran lahan juga dapat memperburuk perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca selama proses kebakaran. Untuk itu penanganan kebakaran lahan khususnya di lahan perkebunan dapat menjadi prioritas utama dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan, melalui pencegahan, deteksi dini, serta koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pekebun.

2.2.2. Isu Strategis

a. Kampanye negatif produk perkebunan Indonesia

Ada isu – isu negatif dari luar negeri terhadap penggunaan produk hasil negara Indonesia dan ASEAN, misalnya: Penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam perkebunan kelapa sawit dapat mencemari sumber air dan tanah, merusak ekosistem dan kesehatan manusia..

Isu-isu negatif yang disebarkan sengaja untuk menekan pengembangan perkebunan di Indonesia, terutama untuk komoditas yang bersaing dipasar global seperti Kelapa Sawit. Kampanye negatif ini apabila tidak ditindaklanjuti akan mengakibatkan penurunan harga komoditas dan permintaan ekspor dari negara-negara lain.

b. Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan

Konflik lahan sering terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Konflik ini muncul karena lahan yang sejak lama dikelola masyarakat digarap oleh perusahaan tanpa ganti rugi. Konflik ini menunjukkan ketidakadilan dalam tata kelola lahan antara perusahaan dan masyarakat, sehingga memerlukan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

c. Kebakaran Lahan Perkebunan

Kebakaran lahan di Sumatera Selatan menjadi masalah tahunan yang berdampak besar pada lingkungan dan sektor perkebunan. Jutaan hektar lahan di Sumatera Selatan dikuasai korporasi HTI, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan rakyat yang terkait erat dengan kejadian kebakaran. Perlu dilakukan tindakan mitigasi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan lahan, karena kebakaran lahan tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi di sektor perkebunan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan meningkatkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim global.

d. Nilai Tambah Hasil Perkebunan

Nilai tambah produk perkebunan masih rendah dikarenakan sebagian besar hasil perkebunan dijual dalam bentuk bahan mentah atau hasil primer tanpa pengolahan lanjutan, sehingga membatasi potensi peningkatan pendapatan petani pekebun. Perlunya upaya diversifikasi produk perkebunan secara berkelanjutan sehingga nantinya mampu meningkatkan pendapatan petani.

e. Akses Petani Pekebun terhadap Sumber Daya

Akses petani pekebun terhadap modal, teknologi pertanian dan akses lahan masih terbatas sehingga membatasi kemampuan mereka dalam pengembangan usaha perkebunan. Akses terhadap sumber daya ini perlu ditingkatkan bagi semua petani pekebun termasuk juga keterlibatan perempuan di semua tingkatan. Meningkatkan partisipasi perempuan di semua tingkatan melalui pelatihan, akses teknologi dan pemberdayaan ekonomi untuk memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai perkebunan.

Tabel 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN Perkebunan	PERMASALAHAN PD	ISU KILAS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Rendahnya produktivitas dan mutu hasil	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	Krisis Sumber Daya Alam	Dampak Hilirisasi mulai terlihat Positif Bagi Pergerakan Indonesia	Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum	Nilai Tarbat Hasil Perkebunan
	Mutu produk yang dihasilkan pada perkebunan (rakyat) pada umumnya masih rendah (asalan), sehingga		Cuaca Ektrim	Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Ketergantungan Komoditas Primer dan Rendahnya Nilai Tambah Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	Kampanye negatif produk perkebunan Indonesia
	Sumber Saya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pelayanan PD	Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	Krisis Sumber Daya Alam	Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	Akses Petani Perkebun terhadap Sumber Daya
	Rendahnya kualitas SDM dan Kelenbagaan petani Kurang tersedianya Infrastruktur sarana dan prasarana perkebunan				Tingkat Kemiskinan yang Relatif Masih Tinggi	
	Iklim berusaha kurang kondusif	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	Polarisasi Sosial	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan
	Kebakaran Lahan Perkebunan	Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Cuaca Ektrim	Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	Kebakaran Lahan Perkebunan
			Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem		Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor	
			Misinformasi dan Disinformasi			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Visi Sumsel 2025-2029 "**Sumsel Maju Terus untuk Semua**" dengan Misi 2 yaitu:

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasisi sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

serta program-program yang dituangkan untuk mendukung pencapaian misi ini yang selaras dengan sub sektor perkebunan, yaitu:

1. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses ketersediaan sarana produksi.
2. Medorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.
3. Melanjutkan program sambung pucuk kopi guna peningkatan produksi.

maka Dinas Perkebunan menyusun Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan untuk mendukung pencapaian apa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kesejahteraan petani sub sektor perkebunan, dengan indikator pencapaiannya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan sub sektor perkebunan adalah meningkatnya produksi tanaman unggulan perkebunan, yang di dalamnya mencakup peningkatan produktivitas dan mutu hasil komoditas perkebunan secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya, akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rentra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan			Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah (masuk di misi ke 2 yaitu: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Rangka Ekonomi ...	1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	1.1 Meningkatkan produksi tanaman unggulan perkebunan		1. Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	%	130,35	116	118	120	122	124	126				
				1.1 Persentase peningkatan produksi Karet	%	0,46	0,109	0,110		0,111	0,112	0,113	0,114			
				1.2 Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0,87	0,445	0,447		0,449	0,451	0,453	0,455			
				1.3 Persentase peningkatan produksi Kopi	%	5,12	3,713	3,715		3,718	3,720	3,725	3,730			
				1.4 Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	0,14	1,441	1,445		1,447	1,449	1,451	1,455			
		1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.1 Evaluasi Aktif dari SAKIP		Ton	61647,2	62.535,540	63.439,170	64.357,140	65.289,670	66.237,030	67.200,790				
					Ton											
					Nilai atau skor	80,72	80,75	80,80		80,85	80,90	80,95	81,00			

3.3. Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Strategis Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan kedepan atau periode 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- o Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor perkebunan dengan memberikan akses yang adil dan setara terhadap teknologi, pelatihan dan pendidikan bidang perkebunan.
- o Melakukan Optimalisasi Lahan-lahan perkebunan yang kurang produktif untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitas.
- o Pembangunan perkebunan diarahkan pada perluasan areal perkebunan sesuai dengan potensi pengembangan dalam RTRW dan topografi kewilayahan.
- o Peningkatan penggunaan sarana perkebunan.
- o Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana di sub sektor perkebunan.
- o Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan
- o Meningkatkan penanganan panen di sektor perkebunan sesuai dengan anjuran dan standar penanganan.

3.4. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan sub sektor perkebunan merupakan rangkaian proses yang sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan perkebunan secara berkelanjutan dan pada akhirnya mampu mensejahterakan petani serta pelaku usaha.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Produksi Perkebunan /TP4)	Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Produksi Perkebunan /TP4)	Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Produksi Perkebunan /TP4)	Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Produksi Perkebunan /TP4)	Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Produksi Perkebunan /TP4)
Adaptasi terhadap perubahan iklim	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Adaptasi terhadap perubahan iklim
Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan	Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan	Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan	Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan	Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan

3.5. Penyajian Lokus

Sumatera Selatan terdiri atas 17 kabupaten/kota yang mempunyai potensi untuk pengembangan komoditas perkebunan. Penetapan lokus dapat dilakukan berdasarkan wilayah administrasi agar memudahkan dalam koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan, serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan yang berlaku demi menjaga keberlanjutan sumber daya alam

Penetapan lokus pembangunan perkebunan juga dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis kawasan yang mempertimbangkan potensi komoditas, kondisi sumber daya dan strategi pengembangan wilayah

3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan sub sektor perkebunan lima tahun ke depan diambil dari strategi yang ditetapkan adalah :

- Mendorong pelaksanaan rehabilitasi tanaman-tanaman perkebunan yang kurang produktif.
- Melakukan diversifikasi tanaman perkebunan dengan tanaman lainnya untuk meningkatkan pendapatan petani perkebunan.
- Mendorong pengembangan lahan-lahan perkebunan sesuai dengan potensi dan kawasan sentra-sentra komoditi unggulan.
- Mendorong peningkatan investasi di sektor perkebunan dalam memanfaatkan pengembangan serta penumbuhan industri hilir.
- Mengembangkan perbenihan dan fasilitasi sertifikasi benih/bibit untuk menjamin kualitas benih/bibit yang beredar dimasyarakat.
- Meningkatkan ketersediaan sarana air mendukung peningkatan produksi.
- Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan perlindungan usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan penanganan kebakaran lahan perkebunan dan meminimalisir gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan.
- Terus melakukan peningkatan ketersediaan alat dan mesin perkebunan agar budidaya perkebunan lebih efektif dan efisien diwilayah pengembangan perkebunan.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan perkebunan yang unggul dan memiliki daya saing.
- Mendorong peningkatan sitem pengolahan hasil perkebunan dan sistem budidaya yang baik serta sesuai dengan anjuran.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
1.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses ketersediaan sarana produksi.	Melakukan diversifikasi tanaman perkebunan dengan tanaman lainnya untuk meningkatkan pendapatan petani perkebunan Mendorong pengembangan lahan-lahan perkebunan sesuai dengan potensi dan kawasan sentra-sentra komoditi unggulan Mengembangkan perbenihan dan fasilitasi sertifikasi benih/bibit untuk menjamin kualitas benih/bibit yang beredar dimasyarakat Meningkatkan ketersediaan sarana air mendukung peningkatan produksi Meningkatkan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Perlindungan Usaha Perkebunan yang berwawasan lingkungan Terus melakukan peningkatan ketersediaan Alat dan Mesin Perkebunan agar budidaya perkebunan lebih efektif dan efisien di wilayah pengembangan perkebunan	Mendukung Misi 2
2.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan lapangan kerja.	Mendorong peningkatan investasi di sektor perkebunan dalam pemanfaatan pengembangan serta penumbuhan industri hilir Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan penanganan kebakaran lahan perkebunan dan meminimalisir gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan	Mendukung Misi 2
3.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Mendorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.	Mendorong pelaksanaan rehabilitasi tanaman-tanaman perkebunan yang kurang produktif.	Mendukung Misi 2
4.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh pertanian di setiap desa untuk mendampingi petani dalam mengembangkan teknik dan teknologi pertanian.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan perkebunan yang unggul dan memiliki daya saing	Mendukung Misi 2
5.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar regional dan global.	Mendorong peningkatan sistem pengolahan hasil perkebunan dan sistem budidaya yang baik serta sesuai dengan anjuran	Mendukung Misi 2

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pembangunan perkebunan lebih dititikberatkan pada pengembangan kawasan agribisnis perkebunan dan peningkatan kualitas produk hasil untuk mendukung pengembangan industri hilir yang melibatkan peran langsung seluruh *stake holders* dalam setiap tahapan kegiatan. Secara garis besar Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2025-2029 telah menyusun 1 Program rutin dan 5 Program pilihan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	3	4	5	6	7	8	9
1 Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah (masuk di misi ke 2)	1 Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	1.1 Meningkatkan produksi tanaman unggulan perkebunan	-	-	1. Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)		
					1.1 Persentase peningkatan produksi Karet (%)		
					1.2 Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit (%)		
					1.3 Persentase peningkatan produksi Kopi (%)		
					1.4 Persentase peningkatan produksi Kelapa (%)		
		1.2 Meningkatkan akuntabilitas Kinerja			1.9 Evaluasi aktif dari SAKIP		
			1.1.1 Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian		1.1.1 Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	
				1.1.1.1 Meningkatkan pengawasan peredaran sarana pendukung pertanian	1.1.1.1 Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	
						Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	3	4	5	6	7	8	9
				1.1.1.2 Meningkatkan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	1.1.1.2 Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
						Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	
						Sub Kegiatan Pertanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
				1.1.1.3 Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme	Periode pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
						Sub kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	
					1.1.2 Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	
			1.1.2 Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		1.1.2.1 Jumlah dokumen dan laporan penataan prasarana perkebunan	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	
				1.1.2.1 Meningkatnya penataan prasarana pertanian		Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Kol.
1	3	4	5	6	7	8	9
			1.1.3 Meningkatkan pengendalian dan penanggulang an bencana perkebunan	1.1.3.1 Terlaksananya pengendalian dan penanggulang an bencana perkebunan	1.1.3 Luas Areal yang terlanggungi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha 1.1.3.1 Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (ha)	Sub kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi Sub kegiatan Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sub Kegiatan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Program Perizinan Usaha Pertanian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	
			1.1.4 Meningkatkan kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	1.1.4.1 Terlaksananya penerbitan Rekomtek usaha	1.1.4 Persentase Izin Usaha yang diawasi dan dibina 1.1.4.1 Jumlah Dokumen Rekomtek usaha perkebunan		

Page 32

1	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan 2	Tujuan 3	Sasaran 4	Outcome 5	Output 6	Indikator 7		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 8	Ket. 9
						1.1.5			
				1.1.5 Meningkatkan Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	perkebunan yang kegiatan usahanya lintas kabupaten/kota	1.1.5.1 Jumlah cakupan binaan kelompok tani (kelompok)		Sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	
					1.1.5.1 Meningkatkan pengembangan penyuluhan pertanian	1.1.5.1.1 Jumlah cakupan binaan kelompok tani (kelompok)		Program Penyuluhan Pertanian	
					1.1.5.2 Meningkatkan pembentukan kelembagaan pekebun berbasis kawasan (komoditi)	1.1.5.2 Jumlah kelembagaan pekebun yang terbentuk (kelompok)		Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
								Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	
								Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
						1.1.6.1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
								Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

1	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan 2	3	Sasaran 4	Outcome 5	Output 6	Indikator 7	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 8	Ket. 9
							Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
							Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
							Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
							Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	
						Perundang-undangan	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	3	4	5	6	7	8	9
						Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
						Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	
						Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	

Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Karangas Pandanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DINAS PERKEBUNAN				30.504.539.564		30.504.539.564	-	39.431.511.798	-	41.431.511.798	-	43.431.511.798	-	45.431.511.798		
Program Punjuang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	15.877.075.884	100%	21.908.539.564	100%	25.571.511.798	100%	27.571.511.798	100%	29.571.511.798	100%	31.495.511.798		
Pengembangan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan dan dokumen	6 laporan dan dokumen	137.347.688	6 laporan dan dokumen	137.347.688	8 laporan dan dokumen	440.000.000	8 laporan dan dokumen	440.000.000	8 laporan dan dokumen	445.000.000	8 laporan dan dokumen	450.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok.	5 Dok.	115.000.000	5 Dok.	67.347.688	5 Dok.	250.000.000	5 Dok.	250.000.000	5 Dok.	250.000.000	5 Dok.	250.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Penyusunan Laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap.	1 lap.	15.500.000	1 lap.	20.000.000	2 Lap.	40.000.000	2 Lap.	40.000.000	2 Lap.	45.000.000	2 Lap.	50.000.000		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	-	-	-	-	45.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000		
Penyenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektor Daerah	Terselenggaranya Validasi Pendukung Statistik Sektor Daerah	-	-	-	-	5.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000		

Page 40

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Ket.									
Bidang Urutan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi/ Kinerja Awal Rencana 2024	Tahun 2025				Tahun 2026				Tahun 2027				Tahun 2028				Tahun 2029				Tahun 2030			
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030													
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	12.148.516.000	1 tahun	16.998.385.000	1 tahun	18.765.511.798	1 tahun	20.611.511.798	1 tahun	22.636.511.798	1 tahun	24.856.511.798												
Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	792 org/bln	792 org/bln	11.818.516.000	792 org/bln	16.748.385.000	792 org/bln	18.416.511.798	792 org/bln	20.281.511.798	792 org/bln	22.286.511.798	792 org/bln	24.505.511.798												
Pelaksanaan Pentastausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pentastausahan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	5 dok.	5 Dok.	330.000.000	5 Dok.	250.000.000	5 Dok.	350.000.000	5 Dok.	350.000.000	5 Dok.	350.000.000	5 Dok.	350.000.000												
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000												
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000												
Administrasi/ Kepegawaian Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	175.000.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	600.000.000.0	1 Tahun	600.000.000.0	1 Tahun	620.000.000.0	1 Tahun	620.000.000.0												
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas berserta atribut telengkapan	-	1 Paket	135.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	270.000.000	1 Paket	270.000.000												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	10 Org	40.000.000	15 Org	50.000.000	20 Org	350.000.000	20 Org	350.000.000	20 Org	350.000.000	20 Org	350.000.000												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	625.000.000	1 Tahun	495.000.000	1 Tahun	1.450.000.000	1 Tahun	1.505.000.000	1 Tahun	1.505.000.000	1 Tahun	1.505.000.000												

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Duacoma/Output	Kondisi Kinerja Awal Rencana 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	245.000.000	3 Paket	200.000.000	3 Paket	500.000.000	3 Paket	550.000.000	3 Paket	550.000.000	3 Paket	550.000.000		
Pengadaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000		
Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok.	2 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	50.000.000.00	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000.00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Lap.	150 Lap.	300.000.000	150 Lap.	200.000.000	150 Lap.	800.000.000.00	150 Lap.	800.000.000.00	150 Lap.	800.000.000.00	150 Lap.	800.000.000.00		
Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan milk daerah pengadaan barang milk daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	850.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lainnya	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	1 Unit Kend. Rd.4	250.000.000	-	-	2 Unit Kend. Rd.4	700.000.000	2 Unit Kend. Rd.4	700.000.000	2 Unit Kend. Rd.4	700.000.000	1 Unit Kend. Rd.4	400.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	25 Unit	150.000.000	25 Unit	250.000.000	25 Unit	250.000.000	25 Unit	250.000.000	25 Unit	250.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	35 Unit	100.000.000	40 Unit	150.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Revisi 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KRL	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pre-SN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.408.053.854	1 Tahun	3.123.966.000	1 Tahun	1.505.000.000	1 Tahun	1.505.000.000	1 Tahun	1.505.000.000	1 Tahun	1.505.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Lap.	1 Lap.	20.000.000	1 Lap.	20.000.000	1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	25.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lap.	12 Lap.	600.000.000	12 Lap.	650.000.000	12 Lap.	700.000.000	12 Lap.	700.000.000	12 Lap.	700.000.000	12 Lap.	700.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Lap.	24 Lap.	788.053.984	12 Lap.	2.453.966.000	12 Lap.	780.000.000	12 Lap.	780.000.000	12 Lap.	780.000.000	12 Lap.	780.000.000		
Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.040.000.000	1 Tahun	774.840.876	1 Tahun	1.700.000.000	1 Tahun	1.700.000.000	1 Tahun	1.650.000.000	1 Tahun	1.650.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peritinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan peritnannya	90 Unit	90 Unit	800.000.000	90 Unit	679.840.876	90 Unit	850.000.000	90 Unit	850.000.000	90 Unit	800.000.000	90 Unit	800.000.000		
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	50.000.000	50 Unit	45.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000		
Pemeliharaan/reha bilas Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	190.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	750.000.000	3 Unit	750.000.000	3 Unit	750.000.000	3 Unit	750.000.000		
Program Pengembangan Pengembangan sarana pertanian	Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	0 Ha	150	2.973.276.000	150	3.530.000.000	300 Ha	5.270.000.000	300 Ha	5.395.000.000	300 Ha	5.470.000.000	300 Ha	5.545.000.000	Serakan Sumasi Mandi Pangan / SSMP	Pengembangan Konsultasi

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Rencana 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengawasan Pemeriksaan Sarana Pertanian	Jumlah Dukungan Pengawasan Pelayanan Sarana Pertanian	4 Lap.	4 lap	931.000.000	1 Lap.	2.225.000.000	2 lap.	2.000.000.000	2 lap.	2.050.000.000	2.050.000.000	2 lap.	2.050.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMMP)	Pengembangan Kemiskinan
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alasiran dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan tersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alasiran dan sarana pendukung pertanian	1 Lap.	4 Lap.	931.000.000	1 Lap.	1.375.000.000	1 Lap.	350.000.000	1 Lap.	400.000.000	400.000.000	1 Lap.	400.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMMP)	Pengembangan Kemiskinan
Pengawasan Pengalihan Hasil Pertanian	Jumlah pengawasan tersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil pertanian	-	-	-	-	850.000.000	1 Lap.	1.650.000.000	1 Lap.	1.650.000.000	1.650.000.000	1 Lap.	1.650.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMMP)	Pengembangan Kemiskinan
Pengawasan Mutu, Pemeriksaan Benih Tanaman	Jumlah Dukungan Pengawasan Mutu, Pemeriksaan dan Pelayanan Benih Tanaman	-	3 Dak	1.909.225.000	3 Dak	1.255.000.000	3 Dak	2.020.000.000	3 Dak	2.970.000.000	2.970.000.000	3 Dak	2.985.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMMP)	Pengembangan Kemiskinan
Pengawasan Mutu Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	-	4.200 Sertif.	130.000.000	4.200 sertif	150.000.000	4.200 sertif	300.000.000	4.300 sertif	300.000.000	300.000.000	4.500 sertif	300.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMMP)	Pengembangan Kemiskinan
Pengawasan Mutu dan Pelayanan Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga.	-	1 Lap.	125.725.000	1 Lap.	30.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMMP)	Pengembangan Kemiskinan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Ket.	
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Rencana 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		12 PS	ProSN	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	-	125.000 big	1.653.500.000	7.500 big	1.075.000.000	82.000	2.470.000.000	82.000	2.495.000.000	82.000	2.520.000.000	82.000	2.545.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Organisasi Kewenangan Provinsi	Periode pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan provinsi	-	1 tahun	133.050.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	350.000.000	1 tahun	400.000.000	1 tahun	450.000.000	1 tahun	500.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan	
Pengembangan dan Penyelidikan Sistem Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme	-	1 Lap.	133.050.000	1 Lap.	50.000.000	1 Lap.	350.000.000	1 Lap.	400.000.000	1 Lap.	450.000.000	1 Lap.	500.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan	
Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Persentase realisasi pembangunan prasarana pertanian	na	na	228.125.000	100	50.000.000	100	450.000.000	100	425.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan	
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen dan laporan penataan prasarana pertanian	-	2 laporan	228.125.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	450.000.000	2 laporan	425.000.000	2 laporan	350.000.000	2 laporan	350.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	-	4 Lap.	28.125.000	1 Lap.	50.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan	

Page 47

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	-	1 Unit	200.000.000	-	2 Unit	300.000.000	1 unit	275.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	Berikan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Area yang tertanggung dari serangan OPT dan Gangguan Usaha (Ha)	-	850	389.785.000	-	550 Ha	1.450.000.000	550 Ha	1.450.000.000	550 Ha	1.450.000.000	550 Ha	1.450.000.000	550 Ha	Berikan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (kegiatan)	-	2 Kegiatan	389.785.000	-	3 Kegiatan	1.450.000.000	3 Kegiatan	1.450.000.000	3 Kegiatan	1.450.000.000	3 Kegiatan	1.450.000.000	3 Kegiatan	Berikan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	600	259.445.000	-	250 Ha	1.000.000.000	250 Ha	1.000.000.000	250 Ha	1.000.000.000	250 Ha	1.000.000.000	250 Ha	Berikan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan
Penganganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani	-	-	-	-	50 Ha	100.000.000	50 Ha	100.000.000	50 Ha	100.000.000	50 Ha	100.000.000	50 Ha	Berikan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengantasan Kemiskinan

Page 48

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Cat.	
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		12 PS	ProSN		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Pencegahan, penanganan, keabakan lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah lusan Pencegahan, penanganan keabakan lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		250 Ha	130.340.000	250 Ha	215.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	Gerakan Samsel Mandiri Pangan (SSMP)	Pengantasan Kemiskinan		
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha yang diawasi dan dibina	no	na	37.900.000	20	50.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	Gerakan Samsel Mandiri Pangan (SSMP)	Pengantasan Kemiskinan		
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rukontek usaha perkebunan			37.900.000		50.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Gerakan Samsel Mandiri Pangan (SSMP)	Pengantasan Kemiskinan		
Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		18 laporan	37.900.000	20 laporan	50.000.000	20 laporan	150.000.000	20 laporan	150.000.000	20 laporan	150.000.000	20 laporan	150.000.000	Gerakan Samsel Mandiri Pangan (SSMP)	Pengantasan Kemiskinan		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	no	na	10.958.377.680	80	3.950.000.000	80	6.440.000.000	80	6.440.000.000	80	6.440.000.000	80	6.440.000.000	Gerakan Samsel Mandiri Pangan (SSMP)	Pengantasan Kemiskinan		
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah cakupan binaan kelompok tani (kelompok)	100 kelompok	94 kelompok	10.947.877.680	94 kelompok	3.800.000.000	100 kelompok	6.340.000.000	100 kelompok	6.340.000.000	100 kelompok	6.340.000.000	100 kelompok	6.340.000.000	Gerakan Samsel Mandiri Pangan (SSMP)	Pengantasan Kemiskinan		

Page 43

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.			
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		12 PS	PnsN
			TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu	TARGET	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	100 Kelompok	94	10.947.977.680	94 Kelompok	3.800.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	Berikan Sumbat Mandiri Pangan (BSMP)	Pengantaraan Kemiskinan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekstensi Pertanian Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan petanian yang terbentuk (kelompok)	-	1 Kelompok	50.400.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	100.000.000	1 Kelompok	100.000.000	1 Kelompok	100.000.000	1 Kelompok	100.000.000	Berikan Sumbat Mandiri Pangan (BSMP)	Pengantaraan Kemiskinan
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	-	1 unit	50.400.000	1 unit	50.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	Berikan Sumbat Mandiri Pangan (BSMP)	Pengantaraan Kemiskinan

Tabel 4.3. Rincian Komponen Belanja

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)												KETERANGAN	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030								4
1	2	3	3	3	3	3	3								
I.	BELANJA OPERASI														
1.	Belanja Pegawai :														
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	29.216.012.094	30.189.539.564	37.231.511.798	39.256.511.798	41.331.511.798	43.631.511.798								
	1) Belanja Gaji Pokok ASN	11.544.829.000	16.748.385.000	18.416.511.798	20.261.511.798	22.286.511.798	24.506.511.798								
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	6.811.176.405	11.846.979.000	13.024.965.198	14.530.810.538	15.983.891.592	17.582.280.751								
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.646.151.996	8.500.844.000	9.350.928.400	10.608.938.032	11.669.831.835	12.836.815.019								
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	337.438.750	320.149.000	352.163.900	415.553.402	457.108.742	502.819.616								
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	67.608.750	86.825.000	95.507.500	110.703.010	121.773.311	133.950.542								
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN	127.654.531	339.452.000	373.397.200	417.025.752	458.728.327	504.601.160								
	7) Belanja Tunjangan PPhv/Tunjangan Khusus ASN	265.914.310	604.979.000	665.476.900	990.294.314	539.323.745	593.256.120								
	8) Belanja Pertubuhan Gaji ASN	93.731.363	194.926.000	214.418.600	245.264.140	269.790.554	295.769.609								
	9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.255	297.000	326.700	378.466	416.313	457.944								
	10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	740.261.418	607.748.000	661.811.098	761.156.328	837.271.961	920.999.157								
	11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.436.782	20.404.000	22.444.400	25.463.944	28.010.338	30.811.372								
	12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	34.307.254	61.209.000	67.329.900	76.388.076	84.026.829	92.429.511								
		20.106.000	42.508.000	46.756.600	53.046.894	58.351.572	64.186.730								
b.	Belanja Pegawai Lainnya ASN														
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.733.652.595	4.901.406.000	5.391.546.600	5.730.701.260	6.302.620.206	6.924.231.048								
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Besaran Kerja ASN	4.733.652.595	4.901.406.000	5.391.546.600	5.730.701.260	6.302.620.206	6.924.231.048								
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS														
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN														
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN														
2.	Belanja Barang dan Jasa	17.671.183.094	13.441.154.564	18.815.000.000	18.995.000.000	19.045.000.000	19.125.000.000								
II.	BELANJA MODAL														
a.	Belanja Modal Tanah	721.687.890	315.000.000	2.200.000.000	2.175.000.000	2.100.000.000	1.800.000.000								
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341.687.890	315.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	850.000.000								
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000	-	1.050.000.000	1.025.000.000	950.000.000	950.000.000								
	TOTAL BELANJA (I + II + III + IV)	29.937.699.984	30.604.639.564	39.431.511.798	41.431.511.798	43.431.511.798	45.431.511.798								

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No. (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Sub Kegiatan (4)	Ket. (5)
1.	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Meningkatkan kesejahteraan petani pekebun	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	
			Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Sub Kegiatan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	
			Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Peningkatan pendapatan petani perkebunan dapat dilakukan dengan dua (2) cara:

1. Peningkatan harga komoditi, tanaman perkebunan yang merupakan komoditas ekspor sehingga harga komoditas sangat dipengaruhi oleh pasar internasional (ekspor), seperti komoditas karet melalui Singapore Comodity (SICOM) dan komoditas kelapa sawit di Rotterdam Belanda. Harga komoditas yang masih fluktuatif dan cenderung menurun sangatlah mempengaruhi pendapatan petani.
2. Peningkatan produksi, saat ini Produksi tanaman perkebunan masih jauh dari standar potensi ideal produksi tanaman perkebunan.

Pada rancangan rencana strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, ada target keberhasilan yang ingin dicapai dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Target capaian tersebut dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	%	130.35	116	118	120	122	124	126	
Persentase peningkatan produksi Karet	%	0.46	0.109	0.110	0.111	0.112	0.113	0.114	
	Ton	1.008.362.07	1.009.461.18	1.010.571.59	1.011.693.33	1.012.826.42	1.013.970.92	1.015.126.84	
Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0.87	0.445	0.447	0.449	0.451	0.453	0.455	
	Ton	3.399.995.63	3.415.125.61	3.430.391.22	3.445.793.68	3.461.334.21	3.477.014.05	3.492.834.47	
Persentase peningkatan produksi Kopi	%	5.12	3.713	3.715	3.718	3.720	3.725	3.730	
	Ton	218667.51	226.766.630	235.211.760	243.956.930	253.032.130	262.457.580	272.247.240	
Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	0.14	1.441	1.445	1.447	1.449	1.451	1.455	
	Ton	61647.2	62.535.540	63.439.170	64.357.140	65.289.670	66.237.030	67.200.780	
Evaluasi Aktif dari SAKIP	Nilai atau skor	80.72	80.75	80.80	80.85	80.90	80.95	81.00	

Potensi peningkatan produksi untuk komoditas perkebunan masih sangatlah besar. Terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti Karet, Kelapa sawit, Kopi dan Kelapa.

Upaya untuk peningkatan Produktivitas tanaman Karet dapat dilakukan dengan kegiatan peremajaan dan pengembangan karet rakyat, pembinaan-pembinaan dalam melakukan *Good Agriculture Practices* (GAP), pengawasan peredaran benih agar benih yang beredar dan tertanam adalah

benih yang bermutu dan sesuai dengan ketentuan, membantu penanggulangan terhadap hama dan penyakit tanaman karet serta memberikan bantuan sarana produksi seperti pupuk.

Untuk produktivitas tanaman kelapa sawit dari kondisi awal tahun 2024 sebesar 3,42 ton/CPO/Tahun diharapkan menjadi 3,54 ton/CPO/tahun pada akhir tahun 2030 dapat dilakukan dengan :

1. Intensifikasi tanaman Kelapa Sawit dengan memberikan bantuan pupuk agar produksi per hektarnya dapat lebih meningkat.
2. Menjaga serta meningkatkan stabilitas Harga komoditi kelapa sawit. Penentuan harga TBS dilaksanakan setiap 2 kali setiap bulannya melalui kegiatan penetapan harga TBS. Harga yang tinggi dan stabil dapat mendorong semangat petani untuk merawat/memelihara tanaman dengan baik sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman.
3. Untuk terus meningkatkan produksi terus dilakukan pengembangan kelapa sawit rakyat, pembinaan-pembinaan dalam melakukan Good Agriculture Practices (GAP), melakukan pengawasan peredaran benih/bibit kelapa sawit palsu, memberikan bantuan benih kelapa sawit unggul serta terus melakukan koordinasi dengan stake holder untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam rangka peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat.

Peningkatan luas areal dan produksi kelapa sawit selain dilakukan dengan pola swadaya serta anggaran swasta dapat juga menggunakan dana perbankan dan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh BPD PKS. Pada tahun 2017-2024 telah dilaksanakan rekomtek 73.207 Ha dan dilakukan peremajaan Kelapa Sawit pekebun seluas 53.415 Ha yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Lahat, Musi Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas, menggunakan dana kelapa sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan kopi, maka perlu terus dilakukan :

- a. Peremajaan tanaman kopi dengan cara rejuvinasi (sambung pucu dengan entres yang merupakan klon unggul;
- b. Penggunaan bibit kopi unggul pada penanaman baru;
- c. Melakukan intensifikasi tanaman kopi.

Meningkatkan produksi dan produktivitas kopi dapat dilaksanakan peremajaan kopi rakyat dengan cara sambung pucuk (rejuvinasi). Selain cepat menghasilkan, peremajaan sambung pucuk juga dapat meningkatkan

produksi kopi hampir 2 (dua) kali lipat dari tanaman kopi biasa. Selain itu masih banyak banyaknya tanaman kopi rakyat yang sudah mengalami fase tua/ rusak (18.702 Ha), kondisi yang tidak terawat dengan baik sehingga produksinya menjadi tidak maksimal. Untuk itu perkebunan Kopi perlu perhatian lebih agar kedepan lebih fokus dalam pembuatan kebun induk/entres yang nanti bisa digunakan untuk peremajaan serta terus melakukan intensifikasi (pemberian pupuk dsb) agar produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

Upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan kelapa perlu terus dilakukan dengan memberikan :

- a) Bantuan bibit kelapa yang unggul
- b) Pengalokasian pupuk bersubsidi yang lebih besar untuk perawatan/pemeliharaan pada komoditi kelapa tersebut.

Permasalahan dalam perkebunan Kelapa Sawit, seperti masih banyak tanaman kelapa yang sudah tua sedangkan belum adanya Blok Penghasil Tinggi (BPT) yang bisa dijadikan kebun induk penghasil benih kelapa sangatlah menghambat untuk peremajaan tanaman kelapa. Selain itu, tanaman kelapa banyak yang hanya merupakan tanaman perkarangan sehingga kurang dalam perawatan yang mengakibatkan produksinya tidak begitu optimal. Peningkatan produksi dapat terus dilakukan dengan memberikan bantuan pupuk serta melakukan peremajaan kelapa yang telah tua diharapkan dapat meningkatkan produksi mendatang.

Selain dari itu, terus melakukan pembinaan-pembinaan dalam melakukan *Good Agriculture Practices* (GAP) serta memberikan bantuan saprodi seperti pupuk untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa.

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sub sektor Perkebunan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci secara lengkap akan ditampilkan pada tabel d bawah ini.

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Persentase Peningkatan Jumlah Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perkebunan yang terfasilitasi Sarana dan Prasarana Perkebunan	%	-	68,00	68,20	68,40	68,60	68,80	69,00	
2 Luas Pengembangan Tanaman Unggulan Perkebunan melalui Intensifikasi, ekstensifikasi, Rehabilitasi dan Peremajaan untuk Meningkatkan Produksi dan Produktivitas	Ha	-	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	
3 Persentase Peningkatan Kualitas dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Perkebunan	%	-	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	
4 Persentase Pelaku Usaha dan kelembagaan Petani yang Dibina	%	0,87	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	
5 Jumlah benih Unggul yang beredar	Benih	19.000.000	19.200.000	19.400.000	19.600.000	19.800.000	19.900.000	20.000.000	
6 Persentase Areal yang Tertangguh dari Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	%	50	52	55	58	60	63	65	
7 Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Pembangunan bidang perkebunan di Sumatera Selatan memegang peranan penting dalam pembangunan regional dan nasional. Baik sebagai sumber pendapatan masyarakat, penyerap kesempatan kerja, sumber devisa bagi peningkatan perekonomian daerah maupun pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, selain harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel dan berbasis kinerja, juga harus mengarusutamakan agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025 - 2029, yaitu

1. *Gender dan Inklusi Sosial*

Dalam sub sektor perkebunan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan serta kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek usaha perkebunan.

2. *Pembangunan Berkelanjutan*

Sub sektor perkebunan diharapkan dapat terus memberikan kontribusi ekonomi yang besar sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

3. *Transformasi Digital*

Merupakan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan dalam pembangunan perkebunan.

4. *Pembangunan Rendah Karbon*

Pada sub sektor perkebunan fokus pada pengolahan lahan yang efisien dan ramah lingkungan, penggunaan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia untuk mengurangi emisi, optimalisasi proses produksi, pemanenan dan pengangkutan hasil yang juga diarahkan untuk meminimalisir emisi karbon.

5. *Pembangunan Berketahanan Iklim*

Difokuskan pada pengolahan lahan, varietas yang tahan iklim ekstrem dan teknologi pertanian yang presisi untuk mengantisipasi perubahan pola cuaca yang dapat mengganggu produktivitas tanaman perkebunan

Mengingat pentingnya peranan perkebunan tersebut, maka melalui Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan, kita membangun perkebunan kedepan dengan

semangat kerjasama yang kokoh antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sehingga harapan kita untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Mudah – mudahan usaha kita akan selalu mendapat Berkah dan Ridho dari **ALLAH SWT. Amlin Ya robbal Allamlin.**

Tim Penyusun Rancangan Renstra

POHON KINERJA

